ISSN:2301-797X

MAJALAH ILMIAH

POLITEKNIK MANDIRI BINA PRESTASI

Volume: 5 No. 2 - Desember 2016

BUKU 4

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL DI MIS ALKHAIRAT DELITUADELISERDANG

Eka Oksani Harahap

KEEFEKTIFAN METODE PENEMUAN TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MAHASISWA PADA MATERI TURUNAN PARSIAL FUNGSI DUA PEUBAH

Frida Marta Argareta Simorangkir

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR KARTUN PADA MATERI MENGARANG NARASI DI KELAS MISAL-KHAIRAT TAHUN AJARAN 2015/2016

Hasni Suciawati

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE *THINK-PAIR-SHARE* UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIKA SISWA SMP NEGERI 4 BINJAI

Imelda

THE EFFECT OF ROLE PLAY TOWARDS THE STUDENTS' PUBLIC SPEAKING COMPETENCE

Noalina Sembiring

TINGKAT PENERAPAN PETANI TERHADAP MATERI DAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN (STUDI KASUS: DESA DALU SEPULUH B, KECAMATAN TANJUNG MORAWA, KABUPATEN DELI SERDANG)

Helena T. Pakpahan

HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI SEBAGAI SUBSTANSI KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK MEREDUKSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Rehulina

PENGARUH PEMBELAJARAN *THINK-TALK-WRITE (TTW)* TERHADAP SIKAP POSITIF SISWA PADA MATEMATIKA

Ribka Kariani

PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI SDS SINAR PEMBAHARUAN HIDUP TANJUNG MULIA

Rumiris Lumban Gaol

POLITEKNIK MBP MEDAN

Jl. Letjen Jamin Ginting
No. 285 - 287 Pd. Bulan Medan
Telp. 061 - 8218605, 8218589
Fax. 061 - 8218605
Email : politeknikmbp@prestasi.ac.id
Homepage : <http://www.prestasi.ac.id>

HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI SEBAGAI SUBSTANSI KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK MEREDUKSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

Rehulina

Dosen Universitas Dian Nusantara Medan

ABSTRAKSI

Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini untuk membentuk suatu perjanjian para pihak dapat menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.

Di dalam KUH Perdata Buku III ditemukan pengaturan perjanjian bernama dalam bab V sampai bab XVIII. Kontrak dagang elektronik berkembang di luar KUH Perdata yang di kategorikan kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract*).¹ Hukum kontrak innominaat bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak atau hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum. Artinya, bahwa kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus. Apabila dalam Undang-Undang khusus tidak diatur maka kontrak innominaat mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam buku III KUH Perdata.

Keabsahan kontrak dagang elektronik sebagai kontrak innominaat harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Lazimnya format kontrak yang dipergunakan di lingkungan masyarakat elektronik adalah kontrak baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Dalam kontrak dagang elektronik kesepakatan dinyatakan dengan cara mengklik tombol setuju (*agree*) atau menyatakan kesepakatan dengan mengirim *e-mail*. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban begitu pula dengan kontrak dagang elektronik. Hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Cara pembayaran dalam kontrak dagang elektronik dapat dilakukan dengan kartu debit, kartu kredit, elektronik money dan toko elektronik sederhana dengan HTLM (*hyper text markup language*). Toko elektronik sederhana dengan HTLM ini sama dengan telepon order atau *e-mail order*.

Kata Kunci: Kebebasan berkontrak, asas berkontrak, kontrak dagang

PENDAHULUAN

Kebanyakan bentuk *e-commerce* adalah berupa pembelian perangkat keras dan perangkat lunak komputer, pembelian perangkat lunak lebih banyak daripada perangkat keras secara online. Jasa finansial, pendidikan, hiburan juga menjadi bidang utama aktivitas komersial. Mengingat tidak meratanya perkembangan *e-commerce* itu sendiri, transaksi perdagangan digital menurut prioritas di atas item-item yang lain, seseorang belum dapat berharap bergerak keluar dari rumusan yang umum dan membuat perincian yang mendalam mengenai impor *e-commerce* dalam berbagai keadaan sekarang ini.¹

Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku on-line pertama. Meski belum terlalu

populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.²

Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pembangunan *e-commerce*. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan *e-commerce* ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan Undang-Undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia

¹ Assafa Endeshaw, *Hukum E-commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hal. 246.

² Esther Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen dalam e-commerce*, www.wordpress.com, 6 Desember 2007

bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce* itu.

Bagaimanapun kompetensi teknologi dan manfaat yang diperoleh memang seringkali harus melalui proses yang cukup panjang. Namun, mengabaikan pengembangan kemampuan teknologi akan menimbulkan akses negatif di masa depan. Keterbukaan dan sifat proaktif serta antisipatif merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi. *Learning by doing* adalah alternatif terbaik untuk menghadapi fenomena *e-commerce* karena mau tak mau Indonesia sudah menjadi bagian dari pasar *e-commerce* global.³

METODE PENELITIAN

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditunjukkan untuk menganalisa kaidah-kaidah hukum tentang kontrak dagang elektronik, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan yang erat kaitannya dengan pokok bahasan. Mengutip istilah Ronald Dworkin, penelitian ini juga disebut dengan penelitian *doctrinal* (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as written in the book*), maupun yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).⁵

³ Ibid.

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2006), hal. 14.

⁵ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Normatif dan Perbandingan Hukum* (Makalah Disampaikan Dalam Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan hukum Pada

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis terhadap hukum dan peraturan tentang kontrak dagang elektronik dan secara langsung penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan memaparkan tentang bentuk dan tujuan dari kontrak dagang elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU ITE serta mengacu kepada asas-asas perjanjian yang terdapat pada KUH Perdata Buku ke III tentang Perikatan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁶ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dalam kontrak dagang elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan penjelasannya, UU ITE dan penjelasannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Buku ke III tentang Perikatan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, artikel, majalah dan jurnal ilmiah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier di luar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Situs web juga menjadi bahan bagi penulisan tesis

Makalah akreditasi), (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tanggal 18 Februari 2003), hal. 1.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 141.

ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. Penggunaan secara layak (*fair use*) terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari internet untuk tujuan ilmiah.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*), dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik tesis ini, seperti: buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan bahan penunjang lainnya.

4. Analisis Data

Dari bahan-bahan telah diperoleh, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni dengan mempelajari, memperhatikan kualitas dan kedalaman data yang diperoleh.

Kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian.⁸ Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, *e-commerce* menimbulkan perjanjian antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perjanjian itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.⁹

Pada dasarnya instrument perlindungan hukum konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, dalam bentuk substansi/isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu, pengajuan klaim, penyelesaian sengketa.¹⁰

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.¹¹

Pada tanggal 20 April 2000, Indonesia telah mulai memberlakukan UUPK. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak konsumen, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi produser.¹²

UUPK dilandasi oleh motif-motif yang dapat diabstraksikan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan demokrasi ekonomi;
- b. Mendorong diverifikasi produk barang dan/atau jasa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat luas pada era globalisasi serta menjadi ketersediaannya;
- c. Globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat luas serta kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa;
- d. Peningkatan harkat dan martabat konsumen melalui hukum (UUPK) untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu perekonomian yang sehat.¹³

Purba menguraikan tentang konsep perlindungan konsumen sebagai berikut: "kunci pokok perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produk tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha".¹⁴

Berdasarkan kesimpulan dari diskusi ilmiah, "Pengembangan *Cyber Law* di Indonesia", kesiapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengantisipasi kegiatan *e-commerce* di Kampus Universitas Padjajaran, tanggal 3 Juni 2000 disimpulkan bahwa hak-hak konsumen dalam *e-commerce* yang tergolong *risk* adalah sebagai berikut:

⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Bayumedia, 2005), hal. 340.

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 14.

⁹ Esther Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen dalam e-commerce*, www.wordpress.com, 6 Desember 2007.

¹⁰ Dikdik M. Arlef Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hal. 158.

¹¹ Esther Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam e-commerce*, www.wordpress.com, 6 Desember 2007.

¹³ Yusuf Shopie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 30.

¹⁴ *Ibid.*

1. Tidak ada jaminan keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hal ini dikarenakan para konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan lewat internet, sebagaimana yang biasa terjadi dalam transaksi tatap muka di pasar;
2. Tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh informasi yang dibutuhkannya dalam bertransaksi, sebab informasi yang tersedia dibuat secara sepihak oleh penjual atau produsen, tanpa ada kemungkinan konsumen melakukan verifikasi;
3. Tidak terlindunginya hak-hak konsumen untuk mengeluh atau mengadu atau memperoleh kompensasi. Hal ini karena transaksi lewat internet, dilakukan tanpa tatap muka, maka ini membuka peluang tidak teridentifikasinya si produsen atau penjual barang/jasa tersebut. Bisa saja produsen hanya mencantumkan alamat yang tidak jelas atau hanya sekedar alamat di surat elektronik atau *electronic mail* yang tidak terjangkau dunia maya. Akibatnya bisa terjadi keluhan maka konsumen akan kesulitan menyampaikan keluhannya. Selain itu dapat juga keluhan konsumen tidak ditanggapi, sebab sulitnya menuntut produsen di dunia virtual;
4. Dalam transaksi pembayaran lewat internet *e-commerce*, biasanya konsumen harus lebih dahulu membayar penuh (menggunakan kartu kredit), barulah pesannya diproses oleh produsen atau penjual. Hal ini jelas berisiko bagi konsumen, sebab membuka peluang terlambatnya barang yang dipesan atau isi dan muatannya tidak sesuai dengan pesanan atau sama sekali tidak sampai ke tangan konsumen (kemungkinan terjadinya wanprestasi);
5. Transaksi *e-commerce* dapat dilakukan antara negara. Bila terjadi sengketa maka akan sulit ditentukan hukum negara mana yang akan dipakai.¹⁵

Dalam hubungan produsen-konsumen, agar penggunaan tanda tangan dan dokumen elektronik tidak merugikan kepentingan konsumen, *digital signature* mengatur ketentuan khusus yang mengharuskan penyedia dokumen elektronik (*provider*) membuat atau menyediakan dokumen konvensional untuk konsumen. Dokumen elektronik yang disediakan tersebut harus dapat dibaca kembali, disimpan,

dan dicetak oleh konsumen, dengan *hardware* dan *software* yang dipersyaratkan oleh provider.

Digital signature mengatur bahwa konsumen harus mengemukakan persetujuannya untuk menggunakan dokumen elektronik. Sebagai syarat persetujuannya tersebut, konsumen harus menyetujui atau menegaskan persetujuannya secara elektronik dengan perbuatan yang selayaknya menunjukkan bahwa konsumen dapat mengakses dokumen dalam bentuk elektronik yang digunakan oleh provider.¹⁶

Pedoman yang perlu diperhatikan dalam penerapan perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan melalui *e-commerce* dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu:

1. Dari sisi produsen/pelaku usaha

Kedudukan produsen dalam hubungannya dengan transaksi perdagangan relatif lebih kuat apabila dibandingkan dengan konsumen. Salah satu bukti kuatnya kedudukan itu adalah produsen berada pada pihak penyedia produk sedangkan konsumen berada pada pihak yang membutuhkan produk, sehingga apapun yang ditentukan oleh produsen sepanjang konsumen membutuhkan produk itu maka konsumen akan menyetujuinya, sehingga lahirlah bentuk-bentuk kontrak baku (*standard contract*) yang menonjolkan prinsip *take it or leaves it*. Kuatnya kedudukan produsen sedapat mungkin harus diawasi karena tanpa pengawasan maka dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam transaksi melalui *e-commerce*, maka perlindungan terhadap konsumen dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberitahuan identitas produsen/pelaku usaha secara jelas yang meliputi alamat tempat berusaha (termasuk *e-mail*), telepon, jenis usaha yang dikelola, apabila memiliki pabrik, perkebunan atau tempat pengolahan lainnya maka dicantumkan alamat pabrik, perkebunan;
- b. Apabila produsen/pelaku usaha cabang harus diberitahukan alamat kantor/perusahaan induknya;
- c. Memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan bisnisnya.

¹⁵ Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 243-244.

¹⁶ Ari Juliano Gema, *Digital Signature: Keberadaannya dan Hambatannya*, www.scribd.com, 25 Februari 2007.

2. Dari sisi konsumen

Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali sebelum mulai melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai identitas diri atau perusahaan (apabila konsumennya adalah perusahaan). Hal yang wajar apabila produsen berkepentingan atas informasi tersebut karena melalui informasi inilah produsen dapat menilai kredibilitas konsumen. Apakah konsumen adalah pembeli yang sungguh-sungguh atau tidak.

Sebaliknya, apakah ada jaminan bahwa data diri/identitas konsumen (perorangan/pengusahaan) tidak digunakan (dikomersialisasikan) oleh produsen seperti untuk pengiriman brosur pemasaran perusahaan. Konsumen sangat memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan dari informasi pribadinya dalam *on-line transaction*. Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan informasi (berupa data diri) maka perlu adanya jaminan dari produsen bahwa data/identitas konsumen tidak ada dipergunakan secara menyimpang diluar peruntukannya tanpa seizin konsumen.

3. Dari sisi produk (barang dan/atau jasa)

Informasi produk sangat penting diketahui oleh konsumen, karena melalui informasi ini konsumen dapat mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Tingkat pengenalan konsumen pada produk yang akan dibeli bermacam ragamnya, bagi konsumen yang mengetahui produk maka informasi produk tidak begitu penting karena hanya akan dijadikan sebagai pelengkap saja, tetapi sebaliknya bagi konsumen yang tidak tahu (awam), maka pengenalan produk sangat penting karena kesalahan dalam memilih produk dapat merugikan konsumen.

Di beberapa negara sudah ada pengaturan mengenai promosi yang ditujukan bagi konsumen anak-anak, hal ini disebabkan anak-anak kadang kala mengalami kesukaran dalam memahami produk apa yang dimaksud dalam promosi tersebut. Sehingga penjual (produsen) harus melakukan tindakan/perlakuan khusus terhadap suatu produk atau penggunaannya yang ditawarkan pada anak-anak guna menghindari salah pengertian.

Oleh karena itu, dalam menawarkan produknya (barang dan/atau jasa) maka produsen diwajibkan untuk:

- Memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk yang ditawarkan sehingga

konsumen tidak disesatkan terutama informasi yang sifatnya mendasar (kualitas produk apakah asli atau imitasi, baru atau bekas, jenis produk, ukuran) di samping informasi-informasi lain yang relevan seperti keunggulan-keunggulan dari produk, kekurangannya. Hal ini penting guna membantu konsumen dalam mengambil keputusan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak;

- Informasi mengenai produk harus diberikan melalui bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan penafsiran secara berlainan;

- Memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan aman atau nyaman untuk dikonsumsi atau diperdagangkan;

- Memberikan jaminan bahwa produk yang diterima sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh produsen pada saat diiklankan (dipromosikan).

4. Dari sisi transaksi

Perlu diketahui bahwa tidak semua konsumen paham dalam melakukan transaksi melalui media internet, sehingga produsen perlu mencantumkan dalam *website*-nya informasi yang jelas dan lengkap mengenai mekanisme transaksi serta hal-hal lainnya berkenaan dengan transaksi, seperti:

- Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam melakukan transaksi;

- Kesempatan bagi konsumen untuk mengkaji ulang transaksi yang akan dia lakukan sebelum mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan yang dibuat oleh konsumen;

- Harga dari produk yang ditawarkan, apakah sudah termasuk pajak atau belum, termasuk ongkos kirim atau belum;

- Mata uang apa yang dipakai;

- Bagaimana mekanisme pengiriman barangnya (dikenal adanya berbagai sistem pengiriman barang);

- Produsen harus menyediakan suatu rekaman transaksi (*record of transaction*) yang setiap saat bisa diakses oleh konsumen yang didalamnya memuat segala sesuatu berkenaan dengan transaksi yang sedang/telah dilakukan. Hal ini penting untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari timbul sengketa;

- Informasi mengenai dapat/tidaknya konsumen mengembalikan barang yang sudah dibeli, apabila diperkenankan, bagaimana mekanismenya;

- h. Apakah diberikan jaminan penggantian barang atau penggantian uang, apabila produk yang diterima tidak sesuai atau rusak;
- i. Mekanisme penyelesaian sengketa;
- j. Jangka waktu mengajukan klaim yang wajar (*reasonable time*).¹⁷

Dalam kerangka hukum-hukum sektoral, tentunya UUPK dapat dipandang sebagai suatu sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan konsumen sebagai sistem hukum tercermin dari rumusan yang terdapat dalam UUPK, yaitu

“Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya Undang-Undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan yang paling mengintegrasikan dan memperkuat hukum di bidang Perlindungan Konsumen”¹⁸

Pasal 7 UU ITE, menyatakan: “Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan”.¹⁹

HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL

Pasal 1473 KUH Perdata menyatakan: “si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai

pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”. Dalam Pasal 1474 KUH Perdata disebutkan kewajiban utama penjual adalah:

1. Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan;
2. Kewajiban menanggung/memberi garansi atas barang yang diperjualbelikan tersebut.²⁰

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

1. Penguasaan atas barang yang dijual secara aman, dan tentram;
2. Terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan pembelannya.²¹

Pasal 9 UU ITE menyatakan: “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.²²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUPK, pelaku usaha dalam hal ini termasuk penjual memiliki hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

²⁰ Naja, H.R. Daeng, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 36.

²¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 342.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9. Yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar meliputi: (a) informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara, (b) informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sah nya perjanjian menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, serta alamat dan deskripsi barang dan/atau jasa.

¹⁷ Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hal. 159-163.

¹⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 326.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 7. Pasal ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak”.

e. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

Berdasarkan Pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

Pelaku usaha diharuskan mengikuti prosedur operasi yang telah ditentukan, sebelum mulai menyediakan dokumen dalam bentuk elektronik untuk konsumen. Prosedur tersebut harus memberikan informasi yang tegas dan jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan yang berkenaan dengan hak konsumen untuk mendapatkan dokumen dalam bentuk kertas ataupun bentuk non-elektronis lainnya;
- b. Pernyataan yang berkenaan dengan hak konsumen untuk menarik persetujuannya terhadap penggunaan dokumen elektronik dan setiap kondisi serta konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat penarikan persetujuan tersebut;
- c. Pernyataan yang menginformasikan konsumen dimana persetujuan berlaku (a) hanya untuk transaksi tertentu yang menimbulkan kewajiban untuk menyediakan dokumen elektronik, atau (b) untuk memperkenalkan kategori-kategori dari dokumen elektronik

yang dapat disediakan sebagai bagian dari hubungan para pihak;

- d. Deskripsi mengenai prosedur yang harus diikuti oleh konsumen dalam rangka (1) persetujuan penarikan, atau (2) pembaharuan informasi yang dibutuhkan untuk menghubungi konsumen secara elektronik;
- e. Pernyataan yang menginformasikan bahwa konsumen, atas permintaannya, dapat memperoleh salinan kertas dari dokumen elektronik, dengan biaya yang dibebankan kepada konsumen atas salinan tersebut; dan
- f. Pernyataan yang menjelaskan spesifikasi dari *hardware* dan *software* yang harus digunakan konsumen untuk mengakses dan menyimpan dokumen elektronik tersebut.²⁵

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBELI

Berdasarkan Pasal 1513 KUH Perdata, maka kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak ada artinya tanpa pembayaran harga.²⁶

Kewajiban pembeli juga termuat dalam Pasal 5 UUPK, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁷

Berdasarkan Pasal 4 UUPK hak konsumen, adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih serta memilih barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan;

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

²⁴ *Ibid*, Pasal 7.

²⁵ Ari Juliano Gema, *Digital Signature: Keberadaan dan Hambatannya*, www.scribd.com, 25 Februari 2007.

²⁶ Julfi Chairi, *Aspek Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, 2005, www.library.com, 8 Desember 2007.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang digunakan;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

Di Indonesia Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak keamanan dan keselamatan;
- b. Hak mendapatkan informasi yang jelas;
- c. Hak memilih;
- d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya;
- e. Hak atas lingkungan.

Selanjutnya Tim Peneliti UI dalam rancangan akademisnya merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan;
- b. Hak untuk memilih;
- c. Hak atas informasi;
- d. Hak untuk didengar;
- e. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan;
- f. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian yang patut.²⁹

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya Nomor 39/248 Tahun 1985 memberikan rumusan tentang hak-hak konsumen yang harus dilindungi oleh produsen/pengusaha. Rumusan hak-hak konsumen ini didasarkan atas hasil penelitian yang cukup lama terhadap 25 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun hak-hak konsumen yang dimaksud adalah:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;

- b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial, ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai dari konsumen;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.³⁰

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu turut serta dalam memberikan perlindungan ini, yaitu:

- a. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen;
- b. Menghindari berkembangnya praktek-praktek bisnis curang/tidak sehat (*unfire trade practices*);
- c. Menciptakan keterbukaan/transparansi;
- d. Menciptakan iklim berusaha yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro.³¹

WANPRESTASI

E-commerce merupakan perjanjian seperti yang terdapat dalam KUH Perdata, maka perjanjian melahirkan juga apa yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melakukan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian.

Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilakukannya prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu.³²

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan

²⁸ *Ibid*, Pasal 4.

²⁹ Barkatullah, Abdul Halim & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal. 146.

³⁰ Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hal. 156.

³¹ Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *op.cit*, hal. 159.

³² Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 238.

tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bagi seseorang.³³

Aplikasi wanprestasi yang dilakukan oleh *merchant* dalam transaksi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya

Dalam *e-commerce*, *merchant* mempunyai kewajiban menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung menikmati dan mengganggu cacat-cacat tersembunyi. Apabila *merchant* tidak melakukan kedua kewajibannya tersebut maka *merchant* dapat dikatakan wanprestasi.

2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

Aplikasi wanprestasi ini adalah pembeli memesan suatu produk, namun pada saat produk itu dikirim kepada pembeli, produk tersebut tidak sesuai dengan permintaan pembeli.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Untuk wanprestasi model ini sebenarnya mirip dengan wanprestasi bentuk yang pertama. Jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat digunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat. Sebaliknya jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi maka digolongkan sebagai tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Wanprestasi disini *merchant* yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata *merchant* melakukannya.

Demikian aplikasi dari wanprestasi yang mungkin terjadi dalam transaksi *e-commerce*. Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual atau *merchant* tentu saja sangat merugikan pihak pembeli. Tetapi untuk mengajukan tuntutan, pembeli harus mendahului tuntutan dengan somasi. Somasi tersebut berupa peringatan agar si penjual melakukan kewajibannya. Jika somasi tersebut tidak diindahkannya maka si penjual berada dalam keadaan wanprestasi.³⁴

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara.³⁵

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Namun, dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) seseorang melakukan wanprestasi dan seseorang tersebut dapat membuktikan bahwa ia berada dalam keadaan memaksa, maka ia akan dibebaskan dari risiko atau tanggung jawab (Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata).³⁶

Demikian Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata disimpulkan: "keadaan memaksa adalah bahwa debitur terhalang dalam mempengaruhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka debitur dibebaskan untuk mengganti biaya ganti rugi dan bunga".³⁷

PEMBUKTIAN

Alat bukti adalah masalah yang sangat sentral dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa. Oleh karena itu, peran hakim sebagai penemu hukum harus benar-benar mengakui dan memasukkan dalam pertimbangan putusnya bahwa data elektronik adalah bagian dari alat bukti di dalam perkembangan bisnis sekarang ini.³⁸

The UNICITRAL Model Law on Electronic Signature of 2001 (the 2001 of model law) diadopsi sebagai implementasi dari UNICITRAL Model Law on Electronic Commerce. Dengan didasari oleh Pasal 7 dari UNICITRAL Model Law on Electronic Commerce agar menuju pemenuhan dari fungsi

³³ Abdul R. Saliman & Hermansyah, dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal. 44.

³⁴ Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 239.

³⁵ Abdul R. Saliman & Hermansyah, dkk, *op. cit.*, hal. 44.

³⁶ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract drafting) Edisi Revisi*, (Jakarta : Megapoin, 2003), hal. 78.

³⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal 18.

³⁸ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung : Citra aditya Bkati, 2006), hal. 116.

tanda tangan di dunia elektronik, Model Law 2001 ini, ditujukan untuk membantu negara dalam mengharmonisasikan, memodernisasikan dan menciptakan kerangka legislatif yang adil, untuk dapat menangani secara lebih efektif masalah tanda tangan elektronik.

Tujuan dari Model Law adalah memberikan dasar hukum untuk menggunakan tanda tangan elektronik, dan perlakuan yang sama terhadap dokumentasi tertulis dan informasi elektronik. Dengan mengadakan prosedur yang dijelaskan pada Model Law terhadap legislasi nasional, negara yang menggunakan dapat menetapkan suatu lingkungan yang netral dengan media (*media neutral environment*). Model Law 2001 memperhatikan prinsip yang bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap berbagai teknik yang mungkin dapat dipakai untuk berkomunikasi atau disimpan informasinya secara elektronik (*technology neutrality*).³⁹

Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik maupun hasil cetak), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara di Indonesia.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.⁴⁰

Menurut Wright, prinsip pembuktian yang dikembangkan oleh hukum sekitar dokumen-

dokumen kertas juga berlaku sah dalam transaksi-transaksi *e-commerce*.⁴¹

Informasi elektronik sebagai alat bukti, merupakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum dari alat bukti tertulis dalam pembuktian perdata yang ada dalam HIR.⁴² Pasal 164 HIR disebutkan 5 macam alat bukti, masing-masing:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.⁴³

Hal ini karena tingkat reliabilitas keamanan dengan menggunakan *electronic signature* adalah sama dengan menggunakan dokumen kertas bahkan lebih baik karena pengaplikasian sistem *e-commerce* yang syarat pengetahuan berarti terdapat validitas substansi informasi dalam proses pengolahan informasi yang ditentukan oleh identitas hukum para pihak yang sah dan jelas. Semua *e-commerce* yang bertumpu pada informasi elektronik dapat diidentifikasi keabsahannya karena konsep kunci atau inti dari keabsahaan bukti dan nilai pembuktian dari informasi elektronik merupakan sentral hukum pembuktian, masih tetap sama yaitu adanya cara-cara untuk membuktikan bahwa informasi elektronik yang dikirim dan yang diterima, tidak diubah dalam proses pengiriman dan penerimaan, tidak dapat dibaca dan diinterpretasikan oleh pihak ketiga manapun.⁴⁴

Kekuatan akta elektronis sebagai alat bukti sebenarnya juga didukung (melalui penafsiran) oleh berbagai peraturan perundangan nasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Pasal 12), yang secara tegas menyebutkan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;

⁴¹ Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag, *E-Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, (Surabaya : Akana Press, 2000), hal. 284.

⁴² Raharjo, *Informasi Elektronik Pada E-commerce Dalam Hukum Pembuktian Perdata*, www.google.go.id, 25 Februari 2008.

⁴³ I.B.R. Supancana, *Kekuatan Akte Elektronis Sebagai Alat Bukti*, www.google.go.id, 25 februari 2008.

⁴⁴ Raharjo, *op.cit.*, www.google.go.id, 25 Februari 2008.

³⁹ [www.aptel.depkominfo.go.id/naskah akademik RUU ITE 2006](http://www.aptel.depkominfo.go.id/naskah%20akademik%20RUU%20ITE%202006), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 21 Februari, 2008.

⁴⁰ *Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184, di mana surat termasuk dalam salah satu alat bukti;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 6 yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronik atau yang terekam secara elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 angka (a), yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.⁴⁵

Pasal ini membuka kemungkinan bahwa dokumen perusahaan seperti yang dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) dapat dialihkan kedalam mikrofilm atau media lainnya. Pengalihan tersebut dapat dilakukan sejak awal, sejak dokumen itu dibuat atau diterima oleh perusahaan atau di kemudian hari. Dalam pengalihan tersebut pemimpin perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 5 angka (1) UU ITE menyatakan: "informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah", bila informasi elektronik ini dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Bahkan secara tegas, Pasal 6 UU ITE menentukan bahwa "terhadap semua ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tulisan atau asli selain yang diatur dalam Pasal 5 angka (4)", persyaratan tersebut telah terpenuhi berdasarkan UU ITE ini sehingga informasi elektronik tersebut dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat di akses, dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁴⁷

Penggunaan alat bukti berupa alat penyadap dan rekaman video sebenarnya telah diterapkan di dalam kasus Bom Bali I, 2002 lalu. Dalam menggunakan alat bukti ini penyidik merujuk pada pasal 27 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Meskipun mengundang kontroversi namun JPU bersikukuh bahwa pembacaan keterangan saksi dari Malaysia dan Singapura yang tidak dapat hadir ke persidangan adalah sah karena sesuai deskripsi alat bukti dalam Undang-Undang.

Selain dalam tindak pidana terorisme, penyidik KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Wewenang ini dicantumkan dalam Pasal 12 angka (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁸

Dalam putusan pengadilan yaitu Putusan MARI Nomor 9/KN/1999, yang dalam putusannya hakim menerima hasil *print out* sebagai alat bukti suat. Kemudian kasus pidana yang diputus di PN Jakarta Timur mengetengahkan bukti *e-mail* sebagai salah satu alat bukti.⁴⁹

Hukum mengenai *e-commerce* yang dibuat oleh UNICITRAL mendefinisikan pesan data (*message*) sebagai berikut:

"data *message* berarti informasi yang dimuat, disimpau atau dikomunikasikan melalui alat-alat elektronik, optik atau semacamnya, tapi tidak terbatas pada EDI, e-mail, telegram, telex atau telekopi".

Hukum ini menghendaki adanya pengakuan hukum terhadap data *message* dan mendefinisikan tulisan/tanda tangan dan nilai pembuktiannya. Model hukum seperti yang dibuat oleh PBB dilampirkan di Apendiks 4. Setiap negara telah dianjurkan untuk membuat hukum ini dengan beberapa modifikasi yang layak yang mungkin perlu dilakukan untuk

⁴⁵ I.B.R. Supancana, *op.cit*,
www.google.go.id, 25 februari 2008.

⁴⁶ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung : Citra aditya Bkati, 2006), hal. 110.

⁴⁷ Julius Indra Dwipayono Singara, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum*

Pembuktian Indonesia,
www.legalitas.org/database/artikel/pidana/esign, 13
Maret 2008.

⁴⁸ www.hukumonline.com Alat Bukti
Elektronik Kian Mendapat Tempat, 11 Februari 2008.

⁴⁹ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom,
Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi,
(Bandung : Refika Aditama, 2005), hal. 111.

menyesuaikan dengan konteks nasionalnya.⁵⁰

Alat bukti otentik yang dimaksud adalah menjaga keaslian data dengan *digital signature*, menjamin serta mengelola kepercayaan lewat *certification authority* (CA). CA berfungsi sebagai lembaga pemberi jaminan yang memastikan bahwa suatu teknologi aman dipakai untuk transaksi elektronis di internet, lembaga yang menjamin dan mengelola *trust* dan menangani pembuatan serta verifikasi suatu tanda tangan digital.⁵¹

Di Amerika, tuduhan monopoli yang ditujukan kepada Microsoft <http://www.wired.com/news/antitrust/>. Sebagian besar alat bukti yang disampaikan oleh pemerintah Amerika terhadap Microsoft adalah *e-mail* yang dikirimkan oleh pegawai di perusahaan Microsoft yang dikirimkan ke masing-masing pihak. Masalahnya, *e-mail* yang dikirim oleh pegawai kantor tersebut cukup mudah untuk dibuktikan keotentikasiannya. Kecuali bisa dibuktikan lain, *e-mail* tersebut merupakan alat bukti yang sah di pengadilan.⁵²

Menurut Roy Suryo, yang dimintai pendapatnya oleh Pansus DPR mengenai UU ITE, Undang-Undang yang menjamin agar sebuah informasi bisa menjadi bukti hukum memang harus ada. Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 membuat semua bukti elektronik, termasuk teks, rekaman, video, itu bisa berdiri sendiri seperti surat bermeterai yang ada tanda tangan atau capnya, sehingga sah sebagai bukti.⁵³

Demikian pula yang diatur dalam UU ITE Pasal 5 menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Tentu saja, informasi elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan ini mengacu kepada UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* 1996 yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik diakui sederajat

dengan tulisan di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti pengadilan. Jadi sebenarnya perluasan alat bukti ini perlu dilakukan dalam rangka mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang semakin berpengaruh dalam segala aspek kehidupan.⁵⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barkatullah, Abdul Halim & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Dindonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Endeshaw, Assafa, *Hukum E-commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia, 2005.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Naja, H.R. Daeng, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Normatif dan Perbandingan Hukum* (Makalah Disampaikan Dalam Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan hukum Pada Makalah akreditasi), (Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tanggal 18 Februari 2003).
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung, Citra aditya Bakti, 2006.

⁵⁰ Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag, *E-Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, (Surabaya : Akana Press, 2000), hal. 288.

⁵¹ Fadhiyah, *problematika Dalam E-commerce (pembuktiaan)*, www.google.go.id, 25 Februari 2008.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Heru Sutadi, *Kebijakan TI SBY Perlu Komitment*, www.majalahindonesia.com/januari 2006, 25 Februari 2008.

⁵⁴ *Alat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat*, www.hukumonline.com, 11 Februari 2008.

- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung, mandar Maja, 1994.
- Shopie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidanan Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2006.
- Widjaya, I. G. Rai, *Merancang Suatu Kontrak Contract drafting Edisi Revisi*, Jakarta, Megapoin, 2003.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Julfi Chairi, *Aspek Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, 2005, www.library.com, 8 Desember 2007.
- www.aptel.depkominfo.go.id/naskah_akademik_RUU ITE 2006, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 21 Februari, 2008.
- Raharjo, *Informasi Elektronik Pada E-commerce Dalam Hukum Pembuktian Perdata*, www.google.go.id, 25 Februari 2008.
- I.B.R. Supancana, *Kekuatan Akte Elektronik Sebagai Alat Bukti*, www.google.go.id, 25 februari 2008.
- Julius Indra Dwipayono Singara, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org/database/artikel/pidana/esign, 13 Maret 2008.
- www.hukumonline.com *Alat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat*, 11 Februari 2008.
- Rapin Mudiardjo, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti*, www.free.vlsm.org, 25 Februari 2008.
- Fadhiyah, *problematika Dalam E-commerce (pembuktiaan)*, www.google.go.id, 25 Februari 2008.
- Heru Sutadi, *Kebijakan TI SBY Perlu Komitment*, www.majalahindonesia.com/januari 2006, 25 Februari 2008.
- Alat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat*, www.hukumonline.com, 11 Februari 2008.
- Dwi, Esther Magfirah, *Perlindungan Konsumen dalam e-commerce*, www.wordpress.com, 6 Desember 2007
- Ari Juliano Gema, *Digital Signature: Keberadaanya dan Hambatannya*, www.scribd.com, 25 Februari 2007